

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain adalah untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam bab pembahasan, penelitian ini difokuskan mengenai peran fasilitator program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) dalam peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat di kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

a. Pengertian Peran

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berintraksi antara satu dengan yang lainnya, dalam menjalankan kehidupan yang mempunyai bentuk peranan antara lain: pertama, peranan individu, maksudnya bagaimana seorang individu menjalankan peranannya sebagai makhluk sosial dalam berhubungan dengan individu lain atau dalam kehidupan seperti atasan dan bawahan. Kedua, peran organisasi atau kelompok merupakan kerja sama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai pemberi harapan bagi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer artinya sebagai berikut:“ Peran adalah suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.⁷ Dalam sosiologi antropologi istilah peran diartikan sebagai posisi orang yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu seseorang yang tidak berdiri sendiri melainkan perlu orang lain untuk saling berintraksi.⁸

Menurut Fieldler peran merupakan sosok seorang pemimpin yang mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan- kegiatan kelompok yang

⁷. Hafied, Cangara. *Komunikasi Politik*. Jakarta. Raja Grafindo. 2009. Hlm. 411.

⁸. Sarwono. sarlito wirawan, *Teori- teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Wali Press. Hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan tugas kelompok.⁹ Menurut Biddle dan thomas peran adalah serangkain rumusan yang membatasi perilaku- perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.¹⁰

Dari beberapa defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang berada pada posisi terpenting dalam kehidupn masyarakat. Namun dalam dalam pelaksanaan peran seseorang bisa terbukti dengan adanya usaha untuk menggerakkan orang atau kelompok yang bersangkutan agar dapat berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan.

Peran sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab,karena dalam setiap kedudukan seseorang memerlukan sikap atau perilaku dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Fasilitator merupakan seseorang yang memegang kekuasaan yang berhak memantau kelompoknya. Jadi yang dikatana peran dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Fasilitator dalam mengembangkan kapasitas kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

b. Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju. Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Fungsi fasilitator adalah mempermudah proses tukar informasi, pengetahuan dan nilai- nilai di antara masyarakat untuk menemukan pengetahuan dan pengalama baru yang akan berguna menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun tugas fasilitator dalam pendampingan kelompok adalah :

⁹. Ibid,Hlm.206

¹⁰. Soekanto.Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Press.1982.Hlm 854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan- perubahan sikap, pengetahuan, dan perilaku baik individu atau pun kelompok.
2. Membantu proses agar masyarakat bisa melakukan identifikasi masalah, merencanakan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam memecahkan masalah mereka termasuk masalah kemiskinan.
3. Mendorong terjadinya saling menghargai, saling peduli dan kerjasama diantara masyarakat dalam memecahkan masalah.
4. Membantu masyarakat baik itu individu maupun kelompok dalam bekerjasama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya misalnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan.
5. Memberikan informasi- informasi yang dibutuhkan.

Beberapa peran yang di jalankan oleh fasilitator antara lain:

1. Fasilitator sebagai pemberi pelatihan kepada kelompok swadaya masyarakat
2. Fasilitator sebagai pemberi bantuan langsung masyarakat
3. Fasilitator sebagai pemberi bantuan teknis kepada kelompok swadaya masyarakat

c. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dan menurut Rappaport pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Menurut Ife Pemberdayaan adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”¹¹.

¹¹. Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. 2014. Hlm.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sumodiningrat pemberdayaan merupakan upaya memberi kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.¹² Pemberdayaan masyarakat menurut kartasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.¹³

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan dan menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang- barang dan jasa yang mereka perlukan. Untuk itu ada beberapa langkah- dalam pemberdayaan masyarakat miskin:

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mtlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. pemberdayaan bertujuan untuk menekan perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin jika berhadapan dengan struktur sosial dan politis.

¹². Aprilia Theresia Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung. 2014. Hlm .120

¹³. Oos M.Anwas. *Op. Cit.* Hlm.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.
- c. Tanamkan rasa kesamaan dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
- d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
- e. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
- f. Redistribusi infrastruktur pembangunan yang merata.

Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimnaa membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah ini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang dan mampu bekerja sama. Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu:

- a. Pengembangan (*enabling*) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya (*empowerment*), kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- c. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah, harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Harus mengikutsertakan langsung atau dilaksanakan oleh masyarakat sasaran.
3. Menggunakan pendekatan kelompok.

d. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)

Program KOTAKU dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Intervensi KOTAKU yang dilakukan terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari miskin menjadi berdaya, kemudian menuju mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakat menjadi madani.

PPMK adalah program lanjutan dari pelaksanaan PNPM- Mandiri perkotaan. Sasaran PPMK di fokuskan kepada peningkatan pendapatan keluarga miskin yang telah bergabung dalam KSM melalui dukungan komponen program berupa pemberdayaan masyarakat. Dalam PPMK proses pemberdayaan lebih ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggota KSM sehingga menjadi kelompok usaha yang mandiri dengan dukungan lembaga keswadayaan masyarakat. Prinsip dasar pengembangan penghidupan masyarakat adalah penguatan akses masyarakat miskin (KSM) kepada lima (5) asset sumber penghidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, yakni modal sumber daya manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), sumber daya alam (*natural capital*), sumberdaya fisik (*physical capital*), dan sumberdaya keuangan (*financial capital*).

1. Tujuan PPMK

Program PPMK ini bertujuan menguatkan kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (*sustainable livelihood*).

2. Prinsip Dasar PPMK

- a. Kemitraan, Semua Pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin.
- b. Kewirausahaan, dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga kegiatan peningkatan penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.
- c. Kelembagaan, KSM menjadi wahana belajar mengukuhkan pranata sosial yang memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggota-anggotanya serta memperkokoh kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggotanya.
- d. Kearifan lokal, Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumberdaya setempat yang ada diwilayahnya maupun sekitarnya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya material, sumberdaya produksi dan pasar, sumberdaya pendanaan, dan sumberdaya lainnya, dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keberlanjutan, Setiap Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Keluaran

- a. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat melaksanakan kegiatan PPMK berorientasi tridaya
- b. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai program tridaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat.
- c. Meningkatnya jumlah warga miskin peserta kegiatan PPMK.

4. Saran

- a. Sasaran Penerima Manfaat
 1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (Prospektif). Untuk KSM ekonomi, Jenis usaha maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin.
 2. Jumlah anggota minimal 5 orang
 3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin
 4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana
 5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lainnya dengan tingkat pengembalian >90%
 6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUBE)
- b. Sasaran Lokasi
 1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “berdaya”
 2. Opini audit tahun buku sebelumnya “wajar tanpa pengecualian”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kinerja sekretariat BKM minimal “*memadai*” selama 3 bulan terakhir.

5. Komponen Program

Kegiatan PPMK terdiri dari 3 komponen sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM
- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPMK. BLM PPMK bersifat stimulan dan disediakan untuk memberi akses kepada masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM peserta PPMK . BLM PPMK dapat digunakan untuk modal kerja, investasi, dan penguatan kapasitas untuk mendukung usaha produktif yang layak berdasarkan penilaian UPK dan mendapat persetujuan BKM yang dinyatakan dalam berita acara penetapan KSM peserta kegiatan PPMK. KSM yang berhak menerima pinjaman BLM PPMK adalah KSM yang sudah tidak memiliki pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lainnya.¹⁴
- c. Bantuan Teknis

e. Peningkatan kapasitas

1. Pemberdayaan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan Posisi - Tawar) agar masyarakat makin mandiri. Penguatan kapasitas adalah Proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terkandung pemahama bahwa :

- a. Kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan menunjukkan /memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

¹⁴. Ibid. Hlm.9-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif melainkan proses yang berkelanjutan,
- c. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas,
- d. Yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, Perkumpulan atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas menyangkut perilaku, nilai- nilai.

2. Penguatan Kapasitas Individu

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar efektif dan efisien ,baik didalam lingkup global.

a. Pengembangan Kapasitas Kepribadian

Kepribadian (Personality) sering hanya dipahami sebatas penampilan(Performance). Tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, kepribadian tidak hanya sebatas penampilan (fisik), tetapi menyangkut keseluruhan perilaku yang meliputi

1. Penampilan Fisik merujuk kepada tingkah laku (gaya duduk, berdiri, berjalan, Keluar masuk ruangan) tata- busana , tata rias, gaya bicara.
2. Nilai –nilai perilaku merujuk kepada kebiasaan, norma dan etika pergaulan yang lain , baik yang dipelihara di dalam sistem sosial tertentu, maupun dalam pergaulan yang lebih luas dengan individu- individu yang berasal dari sistem sosial yang berdeda latar belakang, budayanya.
3. Ketrampilan berkomunikasi, yang meliputi gaya bicara, bahasa, bahasa, penggunaan media, perlengkapan berkomunikasi yang selalu harus disesuaikan dengan karaktristik penerima, serta waktu dan tempat.

b. Pengembangan Kapasitas Di dunia kerja

Kapasitas di dunia kerja merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar laku (marketable) sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktifitas selama melakukan pekerjaannya, maupun untuk pengembangan karirnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

- a. kerja yang meliputi pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan dan ketrampilam manajerial yang Kapasitas untuk memasuki dunia kerja , meliputi persyaratan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta motivasi kerja.
- b. Kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang diperolehnya melalui pelatihan (training, magang, studi banding, penataran).
- c. Kapasitas untuk pengembangan karir yang mencakup budaya – kerja keterampilan berkomunikasi, bekerja dengan tim, saling ketergantungan,serta pengembangan jejaring dan perilaku professional.

3. Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)

Pengembangan kapasitas kelembagaan lebih ditekankan kepada pengembangan mutu entitas. Kapasitas tersebut, meliputi :

- a. Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi
- b. Kejelasan struktur organisasi
- c. Proses organisasi atau pengelolaan organisasi yang menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengendalian.
- d. Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya financial, sumberdaya informasi, maupun sarana dan prasarana.
- e. Interaksi antara individu didalam organisasi.¹⁵

f. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat pemanfaat langsung dari KOTAKU yang langsung menikmati hasil Dari Program Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara partisipasif oleh kelompok swadaya masyarakat muara fajat timur. Pada hakikatnya kelompok swadaya

¹⁵. Totok Mardikanto. *Memberdayakan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.Bandung. 2013. Hlm..69 -73

masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Kelompok Swadaya Masyarakat yang membentuk Kelompoknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan terdiri dari anggota- anggota yang mereka kenal satu sama lain termasuk usaha- usahanya yang beraneka ragam. Kesatuan KSM didasari oleh ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan ,kesamaan kegiatan kesamaan domisili yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial. Dan Tujuan Kelompok Swadaya Masyarakat adalah mewujudkan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berdaya yang mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri dan mampu mencapai tujuan melalui tindakan bersama.¹⁶

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti misruroh,2015, tentang Strategi Fasilitator Program Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) Pada Masyarakat Muslim di Kel. Kampung Badar Kec.Senapelan Pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Afritanti, 2015, tentang Respon Kelompok Swadaya Masyarakat Terhadap On Job Training Program PPMK Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dari kedua penelitian diatas, Penelitian Siti Misruroh lebih fokus terhadap Bagaimana strategi dari fasilitator PNPM untuk menjalankan program PPMK, Pemerintah selaku pengelola PNPM Mandiri tersebut, Sementara penelitian yang akan saya lakukan, lebih di fokus terhadap salah

¹⁶. Kementrian Pekerjaan Umum. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat*. Hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu komponen KOTAKU yang sudah diterapkan pada tahun 2014 ini yaitu program PPMK. Penelitian Agus Afrianti juga lebih fokus mengenai respon dari KSM terhadap pelatihan PPMK tersebut. Sedangkan Penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus membahas mengenai Peran Program PPMK dalam Meningkatkan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Fasilitator program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sehingga peneliti mencoba mendeskripsikan program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Kelompok (PPMK) sesuai kenyataan yang terjadi lapang.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

